

STRATEGI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN MENUJU PENDIDIKAN ISLAM INTERNASIONAL*

Oleh Abd A'la**

Mengangkat signifikansi peran pondok pesantren dalam pembentukan dan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, di Indonesia nyaris tidak perlu diperdebatkan dan diragukan lagi. Jauh sebelum Indonesia merdeka, institusi yang dibidani oleh para ulama (kyai) ini hadir di bumi Nusantara.

Sejarah yang dilalui memperlihatkan bahwa pesantren bukan sekadar mampu menjaga keberlanjutan dari terpaan zaman, tapi juga dapat merawat perkembangannya yang terus meningkat dari saat ke saat. Menurut data yang ada, lembaga ini pertama kali didirikan, khususnya di tanah Jawa, pada abad ke-15 oleh Maulana Malik Ibrahim (salah satu walisongo tertua) dan kemudian ditumbuh-kembangkan oleh para wali songo yang lain. Pada akhir abad ke-19, jumlah pesantren di Jawa berkembang mencapai 300 buah,¹ dan pada tahun 2012 berjumlah 27.230.²

Kebertahanan dan perkembangan berkelanjutan dari pondok pesantren itu tentu tidak bisa dilepaskan dari tradisi keilmuan yang dikembangkan yang memiliki distingsi cukup kuat. Salah satu di antaranya adalah pola pendidikannya yang bersifat transformatif. Hal ini menjadikan pesantren bukan sekadar institusi keagamaan yang sekadar berkiprah dalam dunia pendidikan keagamaan bagi para santri, tapi sekaligus memiliki kepedulian dan peran aktif bersama-sama masyarakat dalam memberdayakan diri mereka. Selain itu, pesantren juga memiliki komitmen dalam penguatan politik kebangsaan.³

Nilai lebih yang dimiliki itu meniscayakan pesantren untuk dikembangkan menjadi pendidikan yang bertaraf Internasional. Internasionalisasi ini menjadi penting dikedepankan, selain untuk pengembangan dan penguatan kualitas pesantren dan civitas akademiknya itu sendiri, hal itu juga untuk menjadikan pesantren dapat berperan lebih besar dalam memberikan sumbangsih konkret bagi kehidupan global.

Pendidikan Internasional di Indonesia

Ada sebagian masyarakat –terutama kalangan awam –yang menganggap pendidikan Internasional atau bertaraf Internasional terkait dengan penguasaan peserta didiknya terhadap bahasa-bahasa Internasional, khususnya bahasa Inggris. Padahal hal itu jauh panggang dari api.

* Disampaikan dalam Halaqoh Ulama “Pesantren: Pendidikan Islam Khas Nusantara menuju Pendidikan Islam Internasional” Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI di Sempur Park Hotel, Bogor 6-8 Oktober 2015

** Guru Besar dan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

¹ Mastuki HS, *Kebangkitan Kelas Menengah Santri: Dari Tradisionalisme, Liberalisme, Postradisionalisme hingga Fundamentalisme*, (Tangerang: Pustaka Dunia, 2010), hlm. 70, mengutip dari Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888*.

² Data Kementerian Agama.

³ Misalnya, pesantren sejak awal berdirinya terlibat aktif dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari perlawanan Pangeran Diponegoro yang didukung oleh para kyai² yang lain pada abad ke-19, perlawanan lokal KH Ahmad Rifai Kali Sasak Batang, hingga Fatwa Jihad 17 September 1945 dan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 merupakan bukti tak terbantahkan dari politik kebangsaan pesantren, para kyai, dan santri. Lihat Zainul Milal Bizawie, *Lasykar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), hlm. 79 ff. Cf. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-20014*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm, 259.

Penguasaan bahasa internasional tentu penting, tapi tidak dengan sekadar para siswa di suatu lembaga pendidikan menguasainya, institusi tersebut serta merta disebut sekolah atau madrasah (bertaraf) internasional. Demikian pula, sebutan Internasional disini bukan hanya berdasarkan, misalnya, nilai tinggi sesuai standar PISA (*Program for International Student Assessment*) yang diperoleh rata-rata para siswa di suatu sekolah/madrasah. Bahkan suatu lembaga pendidikan tidak cukup disebut sebagai sekolah atau madrasah Internasional sekadar merujuk kepada Permendiknas Nomor 78 tahun 2009 yang terkesan lebih mengedepankan aspek kognitif semata.

Ada hal lebih mendasar yang harus melekat pada suatu lembaga pendidikan untuk disebut menganut atau mengembangkan pendidikan Internasional. Dari visi lembaga hingga kurikulumnya mutlak harus merepresentasikan wawasan yang berorientasi kepada kehidupan global dan Internasional. Dalam ungkapan lain, sebagaimana dirumuskan oleh UNESCO, pendidikan Internasional adalah pendidikan yang harus berkomitmen mempromosikan dan memperjuangkan kesepahaman dan solidaritas umat manusia di jagad raya. Demikian pula, pendidikan tersebut niscaya memperjuangkan agar semua manusia berpartisipasi dalam membangun kehidupan dunia yang diletakkan di atas prinsip perdamaian dan keadilan.⁴ Alhasil, selain kurikulum pendidikannya merepresentasikan komitmen untuk mewujudkan capaian dan kompetensi intelektual yang berstandar atau diakui secara internasional, pendidikan yang disebut bersifat internasional juga wajib mengembangkan pemahaman dan kepekaan tentang persoalan global, dan upaya mengatasinya. Demikian juga pendidikan ini juga tentu memiliki kemampuan dalam pengembangan penguasaan peserta didik atas bahasa asing, khususnya Inggris.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan Internasional juga mutlak untuk melestarikan dan memperteguh nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Sebagai misal, kepatuhan kepada ajaran agama tanpa harus terjebak kepada formalisme dan simbol-simbol formal agama perlu dijadikan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan Internasional di Indonesia. Demikian pula, pendidikan Internasional di Indonesia perlu menekankan pentingnya peneguhan nasionalisme keindonesian yang bersesuaian dan berinterdependensi dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan global, agama, dan sejenisnya.

Modal Pesantren Menuju Pendidikan Internasional

Senyatanya pondok pesantren memiliki modal yang cukup kuat untuk mengembangkan pendidikan Internasional. Aspek kesejarahan dan nilai-nilai yang dianut merupakan modal sosial yang sangat potensial untuk mencapai hal itu.

Dari sisi sejarah, pondok pesantren sejak berabad-abad lalu sudah memainkan peran yang cukup signifikan dalam dunia Internasional. Misalnya, pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas ulama pesantren di bumi Nusantara merupakan mata rantai penting dalam jaringan religio-intelektual Internasional. Bahkan tidak jarang di antara para ulama Nusantara berhasil mencapai posisi sosial keagamaan terhormat dengan menjadi pengajar di halaqah-halaqah di Masjidil Haram⁵ yang saat itu menjadi salah satu pusat intelektualitas Islam dunia. Terlepas dari pasang surut yang dialami, pada abad kontemporer posisi itu terus berlanjut yang direpresentasikan oleh tokoh seperti KH Abdurrahman Wahid dan Nurcholis Madjid.

⁴ Lihat *Guidelines and Criteria for the Development, Evaluation and Revision of Curricula, Textbooks and other Educational Materials in International Education in Order to Promote an International Dimension in Education*, (Hasil 2 kali pertemuan para ahli yang diadakan oleh UNESCO di Braunschweig, Germany, 1988 and Brisbane, Australia, 1991)

⁵ Baca Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara: Sejarah, Wacana dan Kekuasaan*, (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 1999). Baca juga Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994)

Penerimaan dan pengakuan dunia Internasional terhadap ulama pesantren menunjukkan bahwa keilmuan keagamaan pesantren –sampai derajat tertentu –memenuhi kualifikasi keilmuan Internasional. Hal ini berpulang kepada sikap pesantren yang selain menekankan pada penguasaan dan kompetensi keilmuan yang bersifat intelektual kognitif, juga sangat memperhatikan aspek praksis. Di samping itu, institusi pendidikan tertua di Indonesia itu juga sangat berkomitmen dalam peneguhan kecerdasan spiritual dan afektif, serta memiliki apresiasi yang sangat tinggi terhadap kearifan lokal. Dalam ungkapan lain, pesantren tidak sekadar mementingkan pada transfer ilmu pengetahuan semata, namun hal yang tak kalah penting adalah melakukan transformasi dalam bentuk upaya melakukan perubahan menuju tumbuh-kokohnya integritas kepribadian dan penguatan jati diri.

Pola pendidikan pesantren semacam itu tampaknya berpulang pada tradisi keilmuan pesantren yang bersifat *fiqh sufistik*⁶. Sufisme yang dikembangkan adalah neo-sufisme yang menekankan kesetiaan dan kepatuhan total kepada syariat, dan sekaligus menganjurkan aktivisme melalui keterlibatan dalam persoalan kehidupan konkret.⁷ Melalui tradisi keilmuan ini, pesantren melakukan kontekstualisasi ajaran, nilai, dan khazanah intelektual Islam ke dalam kehidupan yang konkret.

Kontekstualisasi dan dialog antara agama dan realitas menjadikan Islam Pesantren tidak memandang kehidupan secara dikotomis hitam-putih, rigid, dan mudah menghakimi. Justru Islam Pesantren menyikapinya sebagaimana apa adanya; suatu kehidupan yang penuh dengan dinamika dan kaya warna. Implikasi keislaman ini melahirkan pola keberagamaan yang sejuk, melindungi, dan responsif hadir menyertai sejarah Islam di bumi Nusantara. Sampai batas tertentu, keislaman ini merupakan cikal bakal dan tumbuh kembangnya Islam Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif yang sangat menjanjikan.

Dalam tradisi intelektual pesantren semacam itu pula berkembang nilai-nilai luhur pesantren lain berupa *zuhud*, *wara'i*, *khusyu'*, *tawakkal*, *sabar*, *tawadlu'*, *ikhlas* dan *siddiq*.⁸ Nilai-nilai ini pada awalnya merupakan pandangan hidup kyai yang kemudian dibumikan dan menjadi anutan pesantren danarganya.

Nilai-nilai itu memiliki keunggulan yang sangat kuat untuk dikembangkan dalam kehidupan modern dan global. Kebutuhan dunia kontemporer terhadap moralitas yang mencerahkan umat manusia dan kehidupan menjadi dambaan masyarakat dunia.

Untuk itu, nilai-nilai tersebut perlu pemaknaan yang kontekstual dan transformatif. Misalnya, *zuhud* sejatinya memiliki arti yang terkait erat dengan kesederhanaan, dan kemampuan untuk memilah antara kebutuhan dan keinginan. Keikhlasan mengandung arti keharusan berprestasi. Melalui *ikhlas* kita menyikapi bahwa semua usaha kita semata-mata untuk memperoleh kerelaan Allah. Capaian ini tentu akan diperoleh hanya melalui usaha dan kerja terbaik dan bukan sekadar asal-asalan. Sabar juga perlu dimaknai dengan pola semacam itu. Sabar menyiratkan sikap ketekunan dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Nilai-nilai yang lain pun niscaya dimaknai dengan pemaknaan yang transformatif semacam itu.

Modal sosial yang dimiliki pesantren itu merupakan potensi sangat besar yang bisa mengantarkan pesantren –dan bahkan dituntut –menjadi institusi pendidikan internasional. Melalui pengembangan ini, pesantren diharapkan memiliki sumbangsih konkret pada dunia global. Pada

⁶ Lihat Abdurrahman Wahid, “Asal Usul Tradisi Keilmuan di Pesantren” dalam Jurnal *Pesantren*, (P3M: Nomor Perdana Oktober- Desember, 1984), hlm. 7.

⁷ Lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah ...*, hlm. 294.

⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 164-165.

saat yang sama, pesantren dapat menjadi salah satu simpul pengembangan peradaban Islam, dari Indonesia untuk dunia.

Strategi Pesantren menuju Pendidikan Internasional

Berdasarkan modal yang dimiliki pesantren, dan harapan masyarakat dunia terhadap kehidupan yang lebih bermoral di era kontemporer saat ini, pengembangan pesantren menuju pendidikan internasional memerlukan strategi transformasi holistik yang sangat matang. Melalui strategi ini, pesantren diharapkan mampu membaca kekuatan-kelemahan dan ancaman-peluang yang dimiliki atau dihadapi pesantren. Pada saat yang sama, pesantren dapat merumuskan kebijakan menyeluruh yang dapat mendukung pencapaian transformasi.

Dalam rangka itu, *gap analysis* bisa dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk merumuskan langkah, program dan kegiatan. Dengan demikian, hal yang perlu dilakukan adalah perumusan visi dan misi pesantren internasional. Di sini diperlukan visi yang sangat kuat yang mampu memberikan gambaran ideal tentang masa depan pesantren dan peran-kiprahnya dalam kehidupan. Dari visi itu kemudian diturunkan menjadi misi; suatu kebijakan yang bersifat prinsip yang perlu dijalankan dan dikembangkan untuk mencapai visi.

Terkait dengan itu, pimpinan atau pemangku kebijakan pesantren hendaknya melakukan analisis situasi konkret dan kondisi riil. Modal sosial, capaian dan lainnya diangkat secara cermat kritis, dan obyektif. Semua situasi yang ada itu mutlak tergambar dengan nyata.

Setelah itu, dipetakan kesenjangan antara visi yang ingin diraih dan situasi dan kondisi yang ada tersebut. Melalui pemetaan ini, pesantren dituntut mengembangkan potensi keunggulan yang ada, bagaimana mengatasi kekurangan dan hambatan, bagaimana menangkap peluang yang ada, dan menutup kesenjangan. Semua ini kemudian diturunkan ke dalam perencanaan program, dari pembuatan kurikulum hingga penguatan sumber dayanya. Termasuk juga penyediaan buku pelajaran dan aspek-aspek pedagogik lain. Oleh karena itu, pengembangan kurikulumnya niscaya dapat mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan selain kompetensi global, juga kompetensi keagamaan yang mencerahkan anak didik dan kehidupan. Demikian pula yang harus terjadi pada guru dan buku, kitab bacaan dan aspek-aspek pedagogik yang lain.

Untuk mengawal dan menjamin program internasionalisasi ini secara khusus, dan penguatan kelembagaan dan mutu pendidikan pesantren secara umum, evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan. Evaluasi dalam beragam bentuknya –mulai dari proses, substansi, dan hasil –juga harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari semua kegiatan.

Sejalan dengan itu, pesantren dalam menjalankan roda organisasi sepantasnya menggunakan *Total Quality Management* (TQM). Prinsip-prinsip dasar dalam TQM seperti keterlibatan seluruh tenaga, adanya perbaikan dan pelatihan yang berkelanjutan, dan adanya *teamwork* dijadikan bagian dari transformasi. Demikian pula prinsip-prinsip lain seperti adanya komitmen dan dukungan dari *top management*, manajemen yang demokratis, adanya kepuasan masyarakat dan pengguna, serta adanya perubahan budaya⁹ sangat urgen untuk terus dikawal, dipantau dan dievaluasi. Dalam ungkapan lain, transformasi kelembagaan dan akademik di satu pihak, dan penjaminan mutu di pihak lain merupakan dua sisi dari mata uang yang sama berupa internasionalisasi pendidikan pesantren. Karena itu, kedua aspek itu sama sekali tidak bisa dipisahkan, apalagi diabaikan.

Tentunya, TQM yang sangat bersifat kuantitatif tidak bisa diadopsi mentah-mentah. Ketika dikembangkan di pesantren, manajemen ini perlu diadaptasikan dan dikontekstualisasikan

⁹ Lihat Alexandros G. Psychogios dan Constantinos-Vasilios Priporas “Understanding Total Quality Management in Context: Qualitative Research on Managers’ Awareness of TQM Aspects in the Greek Service Industry” dalam *The Qualitative Report* (Volume 12 Number 1 March 2007) hlm 44 ff.

dengan nilai-nilai, kearifan, dan budaya luhur pesantren. Nilai-nilai dan semangat di balik prinsip dasar itu yang perlu menjadi roh dari organisasi di pesantren.

Catatan Akhir: Internasionalisasi Pesantren yang Berkarakter

Transformasi pondok pesantren menuju pendidikan yang bertaraf internasional tampaknya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Kondisi kehidupan kontemporer dari lokal hingga global menuntut institusi keagamaan yang khas Indonesia ini untuk mengembangkan kiprah yang lebih luas dan lebih bermakna. Dengan pengembangan menuju pendidikan Internasional, pada satu pihak pesantren mengemban amanah untuk mengantarkan para santri untuk menjadi muslim yang berwawasan luas, dan kepedulian terhadap persoalan bangsa dan kemanusiaan sejagad. Pada pihak lain, lembaga pendidikan keagamaan ini perlu juga menjadi rujukan masyarakat dunia dalam membumikan nilai-nilai luhur agama dan kearifan lokal Indonesia.

Namun perlu digarisbawahi, pendidikan Internasional dan lembaga bertaraf Internasional pesantren harus memiliki distingsi dan keunggulan dibandingkan dengan lembaga pendidikan Internasional yang lain. Ia harus meneguhkan watak keindonesiaan dan lekat dengan nilai-nilai keagamaan Islam yang substantif.

Hal lain yang sangat penting untuk ditekankan, Pemerintah mutlak mendukung pengembangan pesantren ini. Namun pada saat yang sama, Pemerintah hendaknya jangan sampai mendikte yang justru akan membelenggu kemandirian pesantren©.